

**EVALUASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS TERMINAL BUSLABUAN PANDEGLANG)**

Rachmi Yulianti

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya
Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten
Email: rachmiyulianti@gmail.com

ABSTRACT

Inter-regional movement of public transport in the city and between districts or cities in the province is expected to realize at least improve the quality and quantity of good infrastructure. with consideration of the author wanted to do Feasibility Evaluation Bus Terminal Labuan. The method used is descriptive qualitative. Data was collected through interviews with a number of informants that are considered relevant to the research. In this study the authors take the theory of William N Dunn, in which to evaluate a policy, there are six elements of evaluation criteria used are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Overall this study to describe the conclusion that the feasibility of the bus terminal Labuan who moved from village to village MargasanaTarogong Labuan Labuan has decent performances, but it's just that its facilities and infrastructure are not worth dikrnakan lack of good management of the terminal. This conclusion is based on observations and information from several informants who becomes the object of research.

Keywords: *Feasibility Evaluation*

A. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perekonomian suatu negara dan masyarakat adalah terselenggaranya sistem transportasi yang efektif dan efisien, disamping dimilikinya sumberdaya alam yang cukup tersedia, sumberdaya penduduk dalam kualitas dan kuantitas yang memadai, serta ketersediaan anggaran pembangunan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat. Salah satunya adalah transportasi masa yang berfungsi untuk memindahkan atau mengangkut barang dan orang dari suatu tempat (daerah) ke tempat (daerah) lain, atau dari suatu tempat (daerah) asal ke tempat (daerah) tujuan, yang sering disebut *origin-destination travel*.

Memindahkan atau mengangkut barang dan orang dari suatu tempat asal ke tempat tujuan berarti menciptakan guna tempat.

Untuk melakukan perpindahan segala jenis objek suatu sistem transportasi tentulah memerlukan tempat untuk memulai dan mengakhiri perjalanan, oleh karena itu diperlukan suatu tempat yang dinamakan terminal. Salah satu terminal yang di Evaluasi adalah Kelayakan terminal bus Labuan.

Pertumbuhan pendapatan masyarakat merupakan indikator bertambahnya kegiatan ekonomi yang melibatkan barang dan jasa. Meningkatnya kegiatan pemenuhan barang dan jasa ini melibatkan lebih banyak produsen dan konsumen. Hal ini menimbulkan bertambahnya pergerakan yang dilakukan. Diharapkan pula

dengan adanya terminal yang lebih baik dapat mendukung pertumbuhan perekonomian di Labuan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI Nomor. 79 Tahun 2013) menjelaskan:

Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang serta moda perpindahan angkutan.

Terminal Labuan, mempunyai peran yang strategis merupakan titik jalur Selatan dari arah Terminal Pakupatan Serang Banten menuju jalur arah Pandeglang selatan yaitu jalur selatan penghubung jalur arah Wisata Pantai Tanjung Lesung, Cibaliung, Wisata Taman Ujung Kulon dan jalur barat Terminal Labuan arah penghubung Labuan Pantai Carita dan jalur utara Terminal Labuan arah penghubung Kota Pandeglang dan Serang, keuntungan lokasi ini menjadikan Pandeglang Banten khususnya Terminal Labuan akan terus berkembang sebagai jasa distribusi serta pintu gerbang menuju ke wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya strategi guna menarik pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota lainnya. Minimal dalam menampung arus pergerakan antar Kota dan Desa.

Berdasarkan data pelayanan angkutan, terminal bus Labuan merupakan terminal bus Antar Kota dalam Provinsi (AKAP) dengan wilayah pelayanan Labuan-Kali Deres, yaitu mobil bus Murni Jaya, Murni, Asli Prima dan Sadar, terminal Labuan merupakan terminal tipe B yaitu terminal khusus untuk kendaraan, mini bus, mikro

bus yang menghubungkan dalam kota dan Desa, Labuan-Pagelaran, Labuan-Panimbang, Labuan-Menes, Labuan-Carita. Kondisi terminal Labuan saat ini sangat kurang terawat dan kurang efektif hal ini bisa dilihat dari kondisi lingkungan di dalam terminal dan pola pengaturan keluar masuk kendaraan yaitu dari jalur masuk dan jalur pemberangkatan angkutan. Selain itu sarana dan prasarana yang ada di terminal bus Labuan kurang nyaman. Hal ini terlihat pada kondisi bangunan terminal bus Labuan yang kumuh dan kurang terawat sehingga terkesan kotor, bau dan rapuh. Keadaan ini dapat terlihat pada mushola, wc umum, halte, loket karcis dan tempat calon penumpang menunggu angkutan yang kondisinya lapuk di makan rayap sehingga tidak berfungsi dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masih banyak lagi sarana yang tidak bisa terpakai. Kondisi tersebut pada akhirnya calon penumpang melakukan peristirahatan dan menunggu kendaraan di luar terminal yaitu di warung-warung pinggir jalan yang terletak di luar terminal.

Keberadaan Terminal Labuan dianggap sudah layak pakai oleh Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang maupun tanggapan masyarakat, terkait keberadaan terminal Labuan di Desa Margasana Kecamatan Pagelaran Tarogong. Hal tersebut dikemukakan oleh Bpk. Suwardi S.IP selaku kasi Bagian Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Terminal Tarogong Labuan, terminal Labuan termasuk terminal tipe B sesuai dengan peraturan pemerintah Menteri Perhubungan Tentang Terminal Transportasi Jalan. Sebagaimana dimaksud penetapan lokasi

terminal tipe B berfungsi melayani kendaraan untuk angkutan antar Kota dalam Provinsi dan angkutan pedesaan. Memperhatikan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan pembangunan terminal yang layak yang telah ditentukan oleh peraturan Pemerintah Menteri Perhubungan (UU RI Nomor 79 Tahun 2013) sebagai berikut :

1. Setiap penyelenggaraan terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan
2. Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
3. Fasilitas utama terdiri dari : jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, pengantar dan penjemput, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, kantor penyelenggara terminal dan loket penjualan tiket.
4. Fasilitas utama yang dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur ke datangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat di tempatkan dalam satu area.
5. Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area harus mempertimbangkan : kebutuhan pelayanan angkutan orang, karakteristik pelayanan, pengaturan waktu tunggu kendaraan, pengaturan pola parkir dan dimensi kendaraan.
6. Fasilitas penunjang berupa : fasilitas penyandang cacat, dan ibu hamil, pos kesehatan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran dan fasilitas umum.
7. Fasilitas umum yang dimaksud adalah : toilet, rumah makan, fasilitas telekomunikasi, tempat istirahat kendaraan, fasilitas produksi pencemaraan udara dan kebisingan, fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang, fasilitas kebersihan, fasilitas perbaikan ringan kendaraan

umum, fasilitas perdagangan, pertokoan, dan fasilitas penginapan.

8. Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Terminal bus Labuan yang tadinya berada di Desa Labuan Kampung Panguseupan berpindah tempat ke Kampung Tarogong Desa Margasana Pagelaran Labuan, dikarenakan luas dan lahan terminal yang ada di Kampung Panguseupan sangat sempit dan menyebabkan kemacetan arus kendaraan roda dua maupun roda empat. Sehingga berpindah tempat ke Desa Margasana Kampung Tarogong Labuan dan mulai dibangun pada tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2004. Tidak menutup kemungkinan untuk kawasan terminal itu bahwa kawasan Terminal bus Labuan dibangun memiliki potensi yang sama dengan terminal yang lain, setelah pindahnya terminal bus dari Desa Labuan ke Desa Margasana terminal bus Labuan kurang terawat dan fasilitas yang ada diterminal kurang baik dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak dapat berfungsi lagi untuk di gunakan, hanya ada warung makan yang sederhana didalam terminal, sarana dan perasarana yang tidak terpakai serta mushola yang jaraknya jauh dari area terminal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat sebagai pengguna fasilitas terminal. Berikut ini adalah gambar fasilitas yang kurang terawat di terminal bus Labuan:

Gambar 1.1
Fasilitas Umum yang Tidak Terawat



Dari Gambar 1.1 diatas adalah gambaran dari fasilitas umum yang tidak layak digunakan. Keberadaan terminal bus di Kampung Tarogong Labuan Desa Margasana yang mendapat sorotan dari masyarakat yaitu mengenai fasilitasnya yang kurang layak seperti fasilitas umum dan fasilitas penunjang yang ada di terminal. Maka permasalahan yang timbul adalah dilihat dari kelayakan lokasi, kelayakan ditinjau fungsi kedepan dan perkembangan lingkungan, kelayakan daya tampung moda dan transit penumpang, daya dukung lahan dan fasilitas atau infrastruktur, keterkaitan dengan perasarana lainnya. Terminal bus Labuan merupakan terminal pertama yang dibangun dengan kriteria terminal tipe B yang ada di Labuan yaitu terminal yang menghubungkan dari Desa ke Kota dan tempat-tempat lainnya. Padahal terminal Labuan mempunyai lokasi yang sangat strategis dan lahan yang sangat luas tetapi tidak dimanfaatkan, seperti fasilitas umum yang tidak terpakai dan tidak berfungsi sehingga tidak bisa digunakan oleh masyarakat pengguna bus. Maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana permasalahan yang ada di terminal Labuan. Maka Untuk itu peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut yang ada di terminal dan mengangkat judul “Evaluasi Kelayakan Terminal Bus Labuan”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari gambaran umum ketidaklayakan terminal di atas maka dapat dirumuskan masalah mengenai bagaimana daya dukung lahan dan fasilitas atau infrastruktur yang ada di terminal?

C. KERANGKA TEORI

1. Evaluasi

Dunn (2013:608) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesmen*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan peroduksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan di buat jelas atau di atasi.

a. Sifat Evaluasi.

Gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntunan-tuntunan yang bersifat evaluatif. Karena itu evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan, diputuskan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang transtipasi dan tidak transipasi, karena ketepatan tujuan dan
2. Sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
3. *Interdependensi fakta nilai*, tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat untuk menyatakan demikian, harus di dukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang di lakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi
4. *Orientasi masa kini dan masa lampau*, tuntutan evaluative, berbeda dengan tuntutan-tuntunan advokatif, di arahkan

pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (*ex post*), Rekomendasi juga mencangkup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (*ex ante*).

5. *Dualitas nilai*, nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dapat di anggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang mereflesikan kepentingan relative dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

b. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik-kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai

diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoprasikan tujuan dan target. Nilai juga di keritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalh yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan saran, analisis dapat menguji alternative sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis ,ekonomis, legal, social, substantive).

Gambar 2.2 kriteria evaluasi menurut Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya manfaat bersih rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektifitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kreteria pareto kriteria paldor-hicks kriteria Rawls
Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan	Konsistensi dengan survai

	kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	warga Negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang di inginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

c. Kriteria Untuk Evaluasi Kebijakan

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteri yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. tipe-tipe kriteria ini telah didiskusikan dalam hubungan dengan rekomendasi kebijakan.

d. Pendekatan Terhadap Evaluasi

Evaluasi, seperti yang kita lihat di atas, mempunyai dua aspek yang saling berhubungan, penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1) Evaluasi Semu

Evaluasi semu adalah pendekatan menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil

kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

2) Evaluasi formal

Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan dan administrator program.

3) Evaluasi keputusan teoritis

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

e. Metode-Metode Untuk Evaluasi

Sejumlah metode dan teknik dapat membantu analisis dalam mengevaluasi kinerja kebijakan. Namun hampir semua teknik tersebut juga dapat digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk rumusan masalah, peramalan dan pemantauan.

Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan

publik yang telah di janjikan meraih dampak yang di inginkan. Dalam bahasa yang singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan. (Budi Winarno 2014:229). Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap ahir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh peroses kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (Budi Winarno 2014:229) evaluasi dapat di bedakan ke dalam dua tugas yang berbeda yaitu :*pertama* adalah untuk menentukan konsekwensi apa yang di timbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. *Kedua* adalah untuk menilai keberhasilan atau ke gagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kreteria yang telah di tetapkan sebelumnya.

Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson (Budi Winarno 2014:230) membagi evaluasi kebijakan di bagi menjadi dua yaitu:

a) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan

fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b) Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut. Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan peroram-program lain? Apakah ukuran-ukuran dasar dan perosedur secara sah di ikuti?. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efesiensi dalam melaksanakan program.

Menurut Edward A. Suchman (Riant Nugroho 2014:715) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan perogam yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
4. Menentukan apakah perubahan yang di amati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain
5. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

1. Terminal

Rahardjo Adisasmita (2013:59) terminal berarti suatu stasiun tempat pemberangkatan atau pemberhentian terakhir atau persinggahan angkutan kereta api, bus dan penerbangan. Di bandingkan dengan jenis kendaraan lain, angkutan jalan (*road transport*) itu mempunyai keunggulan yaitu dapat melaksanakan jasa angkutan dari pintu ke pintu *door to door service*, misalnya dalam angkutan barang, hasil-hasil pertanian atau perkebunan setelah dikumpul dipusat-pusat akumulasi yang selanjutnya dapat diangkut dengan truk langsung dikirim ke gudang eksportir dikota pelabuhan, demikian pula angkutan penumpang dari suatu kota ke kota lain pengangkutan yang lain selama dalam perjalanan.

Dalam angkutan penumpang, terminal merupakan tempat berkumpulnya para penumpang yang akan berpergian dengan menggunakan bus atau para penumpang yang datang dan dapat pula merupakan tempat persinggahan. Besarnya dan sifatnya dari sarana fasilitas yang terdapat pada terminal itu tergantung pada volume angkutan lalu lintas dan frekuensi jasa transportasi. Terminal bus yang memenuhi persyaratan yang baik itu bila terminal tersebut dilengkapi dengan tempat beristirahat (*rest*) yang memberikan perasaan kenikmatan bagi para penumpang dan pengantarnya (*refreshment and personal comfort*) serta tersedia tempat untuk melayani perbaikan dan pemeliharaan kendaraan (*service and maintenance of vehicles*).

Menurut (Salim, Abas, 2012: 103) terminal adalah titik awal atau akhir dari lin operasional

pengangkutan. Fungsi lain terminal adalah untuk pergudangan penumpukan bongkar muat barang-barang (muatan). Adapaun fungsi terminal tergantung pada jenis angkutan (modal sistem) hal mana berbeda yang satu dengan yang lain termasuk fasilitas yang tersedia, terminal bis, pelabuhan udara dan peabuhan laut. Disamping itu terminal mempunyai fungsi untuk barang, transit pengangkutan, melaksanakan pengisian bahan bakar, oli, dan mengadakan perbaikan alat-alat pengangkutan dan yang terpenting adalah selaku penghubung (*link*) intermodal transportasi. Dari segi karakteristik konstruksi bersaing dan fasilitas tersedia berbeda bergantung pada moda transport, kapasitas, operasional jenis angkutan dan *demand* terhadap jasa transportasi. Untuk koordinasi dilapangan pada umumnya ada kerjasama antara pihak pemerintah dengan unit-unit usaha yang dilakukan.

2. Penyusunan Kriteria Pemilihan untuk Pembangunan Terminal Bus Antar Kota

Kelayakan pembangunan proyek terminal harus dilihat dari aspek ekonomi kelancaran angkutan, aspek sosial (berkembangnya pemukiman sekitarnya), aspek tata ruang (tersedianya lahan), aspek lingkungan hidup (dampak pencemaran dan kebisingan) dan aspek peraturan perundang-undangan.

Untuk menentukan lokasi suatu terminal harus mendasarkan pada pendekatan komprehensif (lintas sektoral dan terpadu) dan

kecenderungan (perspektif) masa depan. Peralatan analisis yang digunakan adalah:

- a. Penentuan skor terhadap masing-masing variable dari tiap aspek
- b. Penentuan bobot masing-masing aspek
- c. Menghitung nilai skor dikalikan bobot (nilai tertimbang).

Lokasi yang memperoleh total nilai terbesar berarti yang paling tepat dipilih sebagai lokasi terminal yang akan dibangun.

Lokasi terminal penumpang Tipe B (Antar Kota Dalam Provinsi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk antar Kota dalam Provinsi. menurut keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 79/2013 Tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan, pembangunan terminal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan lokasi terminal harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal
2. Simpul terminal sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh
 - a. Menti, untuk simpul terminal tipe A
 - b. Gubernur, untuk simpul terminal tipe B
 - c. Bupati/atau walikota, untuk simpul tipe C
 - d. Gubernur, untuk simpul terminal tipe C untuk wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan Lalulintas Angkutan Jalan yang diperuntukan bagi pergantian antar moda dan atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
4. Lokasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pasal 66 ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan
 - b. Kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten atau Kota.
 - c. Kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek
 - d. Kesesuaian rencana dan pengembangan atau pusat kegiatan
 - e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain
 - f. Permintaan angkutan
 - g. Kelayakan teknis, finansial dan ekonomi
 - h. Keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan
 - i. Kelestarian lingkungan hidup

Fasilitas terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Fasilitas utama terdiri dari

- a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum
- b. Jalur kedatangan kendaraan umum
- c. Tempat parker umum selama menunggu keberangkatan
- d. Bangunan kantor terminal

- e. Tempat tunggu penumpang dan pengantar
- f. Menara pengawas
- g. Loket penjualan karcis
- h. Rambu-rambu dan papan informasi sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tariff dan jadwal pemberangkatan
- i. Peralatan parker kendaraan pengantar dan taxi

Fasilitas penunjang yaitu berupa:

1. Mushola
2. Halte
3. Toilet
4. Taman
5. Kantin
6. Ruang informasi
7. Jalan
8. Tempat penitipan barang
9. Loket karcis

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang mobilitas penduduk, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien.

D. PEMBAHASAN

Pada subbagian ini peneliti akan dijelaskan informasi yang diperoleh peneliti dilapangan, dan selanjutnya dianalisis sebagai upaya menjawab

permasalahan yang diajukan. Informasi yang di dapat dan diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara kemudian juga memanfaatkan data dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan melakukan teknik *tringulasi* sumber data.

Dengan demikian dalam penelitian ini, keabsahan data didapat membandingkan dan melakukan *krosscheck* terhadap tingkat keberhasilan kelayakan terminal bus Labuan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berada dalam penelitian kualitatif. Hal ini di capai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dokumen, serta membandingkan keadaan dan pandangan masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa bus serta indikator kelayakan dan pengelolaan terminal bus. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposivesampling*.

1. Evaluasi Kelayakan Terminal Bus Labuan Pandeglang

Evaluasi merupakan suatu kajian mengenai nilai pelaksana dari suatu kebijakan pemerintah setelah sebuah kebijakan dirumuskan, disetujui dan diimplementasikan. Langkah selanjutnya yaitu mengukur sejauhmana keberhasilan kebijakan tersebut dalam pencapaian target atau tujuan kebijakan dan menemukan hambatan serta kekurangan-kekurangan dari kebijakan tersebut.

Kelayakan terminal bus Labuan adalah merupakan fasilitas transportasi yang memberikan manfaat-manfaat yang besar kepada masyarakat

khususnya pengguna bus dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat keselamatan dan keamanan. Perpindahan Terminal bus Labuan yang mempunyai lahan yang strategis dan lahan yang sangat luas untuk fasilitas penunjang dan fasilitas umum yang ada di terminal dan bisa dimanfaatkan secara penuh oleh masyarakat.

2. Hasil dan Dampak evaluasi kelayakan terminal bus Labuan

Output (hasil) kebijakan dapat diartikan sebagai apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah apakah perpindahan terminal bus dari Desa Labuan ke Desa Margasana kampung Tarogong pagelaran Labuan sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Kelayakan terminal bus Labuan dilihat dari keberhasilan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam membangun dan menyelenggarakan sebuah terminal bus di Kampung Tarogong Pagelaran Labuan merupakan hasil pemerintah untuk memudahkan masyarakat pengguna jasa transportasi untuk menghubungkan dari desa ke kota, keberhasilan adanya terminal bus Labuan di Desa Margasana pagelaran Tarogong Labuan sangat membantu masyarakat. Sedangkan dampak dapat diartikan apakah suatu pelaksana kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan atau konsekuensi yang timbul dari diadakannya suatu tindakan kebijakan. Dari hal tersebut ada beberapa aspek yang dapat diukur untuk mengetahui sejauhmana kelayakan terminal bus Labuan yang ada di Desa Margasana Kampung Tarogong Labuan. Namun setelah melakukan penelitian ke lokasi baik melakukan wawancara, observasi

lapangan, peneliti mendapatkan data-data yang mendukung penelitian. Namun setelah melakukan proses reduksi data maka didapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut akan di paparkan sesuai fokus penelitian, di antaranya :

a. Efektifitas

Efektifitas yang dimaksud oleh William N.Dunn adalah ketercapaian hasil yang diinginkan, perpindahan terminal bus Labuan dari Desa Labuan ke Desa Margasana Tarogong Labuan salah satu faktor keberhasilan terselenggaranya sistem transportasi yang efektif dan efisien, kelayakan terminal bus Labuan merupakan layanan dan fasilitas transportasi yang harus memenuhi kebutuhan pengguna jasa terminal. Kebijakan adanya terminal bus Labuan merupakan hasil kebijakan pemerintah, sejauh ini kebutuhan transportasi yang dapat menghubungkan desa ke kota merupakan hal yang menjadi latar belakang adanya terminal di Labuan, adanya terminal bus Labuan di Desa Margasana Kampung Tarogong Kecamatan Pagelaran Labuan sudah di anggap layak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal dan dipergunakan sesuai fungsi terminal.

Dari hasil petikan wawancara dengan beberapa responden maka dapat di simpulkan bahwa kelayakan terminal bus Labuan di Desa Margasana Pagelaran Tarogong Labuan sudah dianggap layak oleh masyarakat maupun petugas terminal. Hanya saja fasilitas yang ada di terminal

yang kurang terawat hal ini dapat dilihat pada kondisi fasilitas bangunanyang rapuh dan keropos. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada perawatan dan pengelolaan bangunan yang ada di terminal serta kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terhadap penggunaan fasilitas yang ada di terminal bus Labuan. Sehingga masyarakat pengguna jasa bus jarang menggunakan fasilitas yang ada di terminal, seperti mushola, papan nama informasi, jadwal pemberangkatan, halte, wc umum dan lain-lain. Masyarakat menunggu kendaraan bus diluar terminal dan memanfaatkan fasilitas tempat yang ada di luar terminal, contohnya: menunggu bis di depan warung yang berada di luar area terminal.

b. Efisiensi

Efisien (*efficiency*) seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kelayakan terminal bus Labuan adalah untuk meningkatkan kenyamanan terhadap penumpang sebagai sarana penunjang transportasi yaitu untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam menunjang mobilitas penduduk, sehingga perlu dikelola secara efektif dan efisien. Peneliti ingin mengetahui sepenuhnya apakah anggaran pemeliharaan terminal sudah dimanfaatkan terhadap pengelolaan terminal dan sudah dimanfaatkan oleh para penumpang angkutan.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa, terminal bus Labuan dari penyediaan fasilitas yang ada di terminal dari segi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh suatu terminal itu

sebetulnya sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan penumpang maupun kendaraan yang beroperasi yang ada di terminal, hanya saja kondisinya sudah kurang layak sehingga tidak bisa digunakan.

c. Perataan

Perataan merupakan kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil di distribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Pada kelayakan yang ada di terminal bus Labuan setelah berpindahnya terminal bus Labuan dari Desa Labuan ke Desa Margasana Tarogong Labuan merupakan penentuan (pemilihan) lokasinya untuk kelancaran angkutan umum. Biaya pembangunan terminal merupakan biaya yang cukup besar untuk didistribusikan kepada terminal Labuan. Dari awal pembangunan terminal biaya pemanfaatan dan pemeliharaan terminal apakah sudah di distribusikan secara merata, dari hasil pengelolaan data dan observasi ke lapangan peneliti menemukan sedikitnya rambu-rambu pengaturan di lokasi terminal serta belum adanya papan informasi, yang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan angkutan umum dan tidak terlihat juga adanya loket penjualan tiket di lokasi terminal menjadikan terminal kelihatan tidak beraktifitas layaknya terminal pada umumnya.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa setelah pindahnya terminal bus Labuan dari desa Labuan ke desa Margasana selain sudah mencukupi kebutuhan terminal bus Labuan, hanya dari segi infrastrukturnya harus banyak di perbaiki

agar memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi umum di desa Labuan.

d. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktifitas, suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi kelayakan terminal. Tanggapan masyarakat setelah adanya terminal bus Labuan di Desa Margasana membawa dampak yang positif berupa dukungan dari masyarakat pengguna jasa transportasi dan ada juga wujud negatif dari pengelolaan terminal yaitu tidak bisa memberikan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat. Pengelolaan dan Pengoprasian terminal dirasa kurang optimal, diikuti dengan pengawasan dan tindakan yang kurang aktif oleh petugas terminal.

Dari hasil petikan wawancara diketahui bahwa respon masyarakat terhadap kelayakan terminal bus Labuan dalam pengelolaan terminal dan pelayanan terminal terhadap masyarakat sudah kurang optimal dan kurang berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari kurang optimalnya segala fasilitas penunjang yang ada di terminal.

e. Ketepatan

Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Terminal bus Labuan merupakan titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Lokasi terminal bus

Labuan di Desa Margasana merupakan terminal bus yang menghubungkan dari Desa ke Kota, keberadaan terminal tersebut sejauhmana masyarakat atau pengguna jasa transportasi menanggapi adanya terminal di Desa Margasana Tarogong Labuan.

Dari petikan wawancara dapat disimpulkan bahwa perpindahan terminal bus Labuan dari Desa Labuan ke desa Margasana Tarogong Labuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Dari hasil tanggapan Kasi UPT Terminal maupun pegawai Terminal dan masyarakat, kelayakan terminal bus Labuan sudah dianggap layak untuk di gunakan, namun dari fasilitas umum dan fasilitas penunjang terminal belum layak, karena fasilitas umum dan fasilitas penunjang kurang optimalnya dalam perawatan sehingga fasilitas yang ada di terminal kurang dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Padahal Terminal bus Labuan merupakan jaringan transportasi jalan yang ada di Kabupaten Pandeglang, difungsikan sebagai satu pusat pelayanan umum. juga tempat untuk pengendalian, pengawasan, pengaturan serta pengoprasian lalu lintas yang akhirnya merupakan prasarana untuk kelancaran berlalu lintas.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Dari hasil analisa dan pembahasan maka dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh pindahannya terminal bus Labuan dari Desa Labuan ke Desa Margasana Kecamatan Pagelaran Tarogong Labuan, karena lahan terminal sebelumnya sangat sempit dan berada dekat dengan pasar dan pertokoan di Desa Labuan tersebut sehingga mempengaruhi jaringan angkutan umum yang ada dipasar Labuan dan sangat mengganggu angkutan umum lainnya.
2. Perpindahan terminal bus Labuan dari Desa Labuan ke Desa Margasana Labuan kondisinya saat ini kurang terawat, kumuh dan sebagian tidak layak pakai sehingga fasilitas yang ada di terminal kurang dimanfaatkan masyarakat khususnya pengguna bus.
3. Dengan adanya terminal Labuan di Desa Margasana Tarogong Labuan masyarakat sebetulnya sangat terbantu dalam mobilisasi angkutan umum, namun karena kondisi terminal dengan keadaan fasilitas yang tidak layak pakai sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna terminal

2. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan ada beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait:

1. Pindahannya terminal bus dari Desa Labuan ke Desa Margasana

Kecamatan Pagelaran Tarogong Labuan perlu adanya renovasi dan pemeliharaan terkait kondisi terminal dan fasilitas yang kurang mendapatkan perawatan.

2. Untuk mengantisipasi perkembangan yang ada dan melakukan perbaikan sesegera mungkin, supaya terminal bisa berfungsi sesuai dengan fungsi terminal itu sendiri, sekaligus bisa menjadi sebuah fasilitas umum yang mampu membantu pengguna pemberi jasa angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabetas
- Adisasmita, Rahardjo, 2014, *Manajemen Pembangunan Transportasi* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunn, N. William, 2003, *analisis kebijakan public*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Salim, Abbas, 2012, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Nugroho, Riant. 2014, *Public Policy, edisi 5*. Jakarta: PT. Elex Media Komutindo Kelompok Gramedia Jakarta
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik: teori, peroses, dan studikusus*, Yogyakarta :Media Perssindo

Dokumentasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu lintas dan
angkutan jalan

www.JURNAL-SAID-RIZAL.ILMU-

PEMERINTAHAN-2013.co.id

www.dishubkominfo.pandeglangkab.go.id